

BAB IX

REALISASI PANCASILA

A. Pendahuluan

Realisasi secara praktis ini sangat penting karena pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada haikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai, yang ada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan serta diamalkan dalam kehidupan secara kongkrit didalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai nilai pancasila diangkat dari nilai nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia (*local wisdom*), yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serat nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu, oleh *The Founding Father* bangsa Indonesia (pendiri bangsa dan negara Indonesia) kemudian dibahas dan dirumuskan dengan melakukan sintesis dengan pandangan besar dunia, lalu disepakati melalui konsensus musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai ideology dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, maka realisasi serta pengalaman pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan suatu keharusan baik secara moral maupun secara hukum. Berbagai pandangan dan pendapat mengatakan bahwa, nilai-nilai pancasila yang sangat bagus mulia tersebut tidak ada artinya tanpa direalisasikan secara nyata dalam kehidupan kongkrit sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aktualisasi pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi pancasila *Subjektif* yaitu realisasi pada setiap individu, dan aktualisasi *Objektif* yaitu realisasi dalam segala aspek penyelenggaraan kenegaraan dan hukum.

B. Realisasi Pancasila yang Objektif

Pengamalan pancasila yang *objektif* yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam implementasi penjabaran pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara republik Indonesia, yaitu realisasi kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Oleh karena itu implementasi pancasila yang *objektif* ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas dengan norma- norma kenegaraan.

Dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, yang termuat dalam Lembaran Negara Berita Republik Indonesia tahun II No.7 dinyatakan bahwa, dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan ‘negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Hal ini berarti mengandung suatu konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita moral yang luhur.

Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan pancasila yang *subjektif* itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan kerokhaniaan yang mewujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu bentuk kehidupan keharmonisan yang mewujudkan bentuk kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran *wajib hukum* dengan kesadaran *wajib moral*.

Pengertian penjabaran pancasila yang *objektif* adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, hal itu antara lain sebagai berikut:

- a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUdD 1945 alenia IV. Hal ini mengandung arti bahwa pancasila sebagai sumber atas, norma dan derivasi segala aspek penyelenggaraan negara. Konsekuensinya dalam penilaian atau pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka pancasila sebagai *batu uji* dalam menentukan suatu peraturan perundangan itu bermakna, adil atau tidak.
- b. Pelaksanaan Undang -Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar filsafat negara Indonesia.

- c. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terdandung dalam filsafat negara.
- d. Interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan dibawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan aspek kenegaraan lainnya.
- e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas kerohanian pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerohanian pancasila.

Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain.

- 1) Bentuk dan hukum kedaulatan dalam Negara.
- 2) Hukum, perundang-undangan dan peradilan.
- 3) Sistem Politik dalam dan luar negri.
- 4) Keselamatan, keamanan dan pertahanan.
- 5) Kesejahteraan.
- 6) Kebudayaan.
- 7) Bentuk dan hukum kedaulatan dalam Negara.
- 8) Hukum, perundang-undangan dan peradilan.
- 9) Sistem Politik dalam dan luar negri.
- 10) Keselamatan, keamanan dan pertahanan.
- 11) Kesejahteraan.
- 12) Kebudayaan.
- 13) Pendidikan, dan lain sebagainya (Notonagoro, 1971:43,44)
- 14) Tujuan negara.
- 15) Reformasi dan segala pelaksanaannnya
- 16) Pembangunan Nasional dan lain pelaksanaan kenegaraan.
- 17)

C. Realisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi pancasila yang *subjektif* adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warganegara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiaan individu untuk merelalisasikan pancasila. Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum, telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Fenomena kongkrit yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi pancasila secara subjektif disebut moral pancasila. Maka aktualisasi pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Nilai- nilai pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia, maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas (yaitu nilai- nilai pancasila, sikap dan karakter) sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pegalaman tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Jadi keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Aktualisasi serta pengalaman itu bersifat jasaniah maupun rokhaniah, dari kehendak manusia.

D. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Realisasi nilai nilai pancasila dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik disekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- **Pengetahuan**, yaitu pengetahuan yang benar pancasila, baik aspek nilai, norma maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Bagi kalangan intelektual pengetahuan pengetahuan itu meliputi aktualisasi pengetahuan biasa(sehari-hari), pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmunan. Dalam

proses transformasi pengetahuan ini diperlakukan waktu yang cukup dan berkeseimbangan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideology bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideology generasi penerus bangsa.

- **Kesadaran**, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam dan diri sendiri.
- **Ketaatan**, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, adapun wajib batin dari diri sendiri.
- **Kemampuan kehendak**, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan, berdasar nilai-nilai pancasila.
- **Watak dan hati nurani**, agar orang selalu mawas diri, yaitu:
 - a. Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan pancasila dan memberi sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman pancasila berupa perintah, larangan, anjuran, atau membiarkan untuk berbuat/tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga.
 - b. Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengaktualisasikan pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
 - c. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran pancasila, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan.
 - d. Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian berwatak dan berhati nurani pancasila sehingga akan terjemala negara dan masyarakat pancasila.

Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat *statis* dan bersifat *dinamis*. *Statis* dalam pengertian intinya atau esensinya (yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaniyah dan universal) sehingga ciri khas, karakter yang bersifat tetap dan tidak berubah. Bersifat *dinamis* dalam arti bahwa aktualisasinya senantiasa bersifat dinamis inovatif, sesuai dengan dinamika masyarakat, perubahan, serta konteks lingkungannya. Misalnya dalam konteks lingkungan kenegaraan, sosial, politik, hukum, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, hankam, kehidupan keagamaan, LSM, organisasi masa, seni, bahkan lingkungan dunia IT, internet dan konteks lingkungan masyarakat lainnya.

- **Strategi dan metode**, proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta metode relevan dan memadai. Hal ini berdasarkan realitas objektif, bahwa subjek dan objek internalisasi dan aktualisasi itu adalah manusia dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam proses internalisasi dan aktualisasi harus ditetapkan strategi yang relevan serta metode yang efektif.

E. Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila

Pemahaman dan aktualisasi pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan
- 2) Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggarakannya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan mentalitas.

Yang lengkap, dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran pancasila. Kemudian diserapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan.

- 1) Mengetahui keadaan sendiri, memahami, serta memiliki pengetahuan pancasila.
- 2) Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan pancasila.

- 3) Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan.

F. Metode Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila

1. Pembudayaan Pancasila melalui Pendidikan Formal

Pembudayaan Pancasila melalui lembaga pendidikan formal, bagaimanapun juga, sebagai sarana yang paling efektif, karena pendidikanlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku manusia. Dalam penelitian ini juga ditemukan data bahwa Guru di dalam mentransfer pengetahuan kepada anak didiknya, tentunya harus menggunakan media yang bervariasi: pelajaran di kelas, pelajaran di lapangan, memutar film yang kesemuanya untuk mengurangi rasa kejenuhan. Karena dalam kejenuhan orang sulit untuk diajak mengingat, menghafal apalagi untuk berpikir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan formal lah sebagai sarana, cara, wahana, metode yang paling memungkinkan untuk penanaman nilai-nilai Pancasila.

2. Pembudayaan Pancasila melalui Media di Luar Pendidikan Formal

Generasi muda sekarang sangat akrab dengan teknologi komunikasi: internet dan hand phone. Banyak sekali keuntungan positif yang diperoleh dengan pemakaian dua alat komunikasi tersebut: informasi dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Namun alat tetaplah alat, yang penting adalah “the man behind the gun”, sarana tetaplah sebagai sarana seandainya pun dapat menjadi tujuan hanyalah tujuan antara, bukan tujuan akhir. Internet dan hand phone dengan segala fungsinya, tidak diragukan, dapat digunakan sebagai sarana yang efektif bagi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda.

3. MEDIA

Dalam penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan pada pembudayaan Pancasila baik di desa maupun di Kota. Artinya bahwa generasi muda di desa dan kota memiliki kecenderungan, pemahaman, dan akses yang sama “mudah” terhadap teknologi.

Dari hasil penelitian diperoleh data pemanfaatan media sebagai berikut:

a. Media Massa.

Sebagian besar data menunjukkan bahwa media pembudayaan Pancasila melalui media elektronik, yang paling diinginkan adalah melalui televisi dengan bentuk yang bermacam-macam seperti: Program dengan kemasan serius, santai dan hiburan, advertorial: Iklan yang kreatif, iklan layanan masyarakat yang disesuaikan dengan isu-isu kepemudaan. Meski demikian ada pula yang mengusulkan agar pembudayaan pancasila juga melalui media Cetak.

b. Media Budaya.

Pemanfaatan media budaya juga bisa dijadikan alternatif pembudayaan misalnya dengan menumpang pada budaya-budaya lokal yang sedang dipertunjukkan, kesenian namun semuanya harus dibuat simple dan sesuai dengan minat generasi muda saat ini, melalui lagu semisal Garuda di dadaku.

c. Media Agama.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, untuk itu media/lembaga keagamaan bisa dimaksimalkan. Contohnya adalah kunjungan ke pesantren/greja moderat, Jika di Bali ada Megibung, metirta yadva (sembahyang ditempat suci).

d. Internet.

Internet merupakan salah satu media pembudayaan yang paling favorit dibandingkan dengan media yang lain. Disamping itu diinternetpun banyak alternative pilihan yang bisa dimanfaatkan, misalnya: (1) Menggunakan social media seperti YM, Facebook, Twitter, blog; (2) Game online seperti “revolution” atau game-game simple seperti yahoo games, google chrome, facebook, dll. Game ini muatannya bisa diganti dengan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak membosankan dan mudah dicerna.

e. Komunitas.

Keberadaan komunitas/kelompok masyarakat juga bisa dijadikan alternatif pembudayaan. Misalnya organisasi pemuda, pramuka, kelompok hobi, semuanya dapat digunakan sebagai sarana penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Bahkan ada yang mengutarakan perlu diadakan penataran Pancasila pada ormas pemuda yang ada.

f. Media Lokal.

Potensi lokal yang sangat beragam yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia juga layak mendapatkan perhatian. Ada beberapa jalan yang bisa di tempuh yakni dengan merekonstruksi/menggali cerita rakyat/dongeng/mitos-mitos nusantara, lalu menarik benang merahnya pada nilai-nilai Pancasila, menggunakan bahasa dan nilai-nilai lokal lebih cocok untuk pembudayaan Pancasila, kegiatan bakti sosial.

Selain berbagai media di atas masih ada pula beberapa media yang bias dijadikan sarana yakni melalui spanduk, baliho, maupun banner. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peran dan dukungan pemerintah dalam membudayakan Pancasila.

5. LINGKUNGAN KOMUNIKASI

Beberapa temuan penting yang menyangkut gambaran lingkungan komunikasi yang dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan generasi muda terhadap Pancasila, sebagai berikut:

- 1) Generasi muda memandang bahwa lingkungan komunikasi berperan penting untuk menentukan keberhasilan materi dan metode pembudayaan nilai Pancasila. Pilihan materi dan metode yang digunakan haruslah dikaitkan dengan konteks realitas lingkungan kehidupan dan penghidupan generasi muda.
- 2) Generasi muda memiliki persepsi bahwa lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sering menjadi referensi yang efektif bagi mereka untuk mengadopsi nilai-nilai, termasuk kemungkinan nilai Pancasila.
- 3) Terlepas dari daerah tempat tinggalnya, generasi muda cenderung menghindari lingkungan yang mengungkung atau mendikte; sebaliknya atmosfer kebebasan untuk memberikan interpretasi atas nilai bersama menjadi tuntutan di dalam proses pembudayaan Pancasila.
- 4) Lingkungan yang mampu memproduksi dan mereproduksi keteladanan menjadi harapan sekaligus tuntutan generasi muda untuk menarik minat dan kesetiaan mereka menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Lingkungan primer (keluarga), sekunder (sekolah) dan tersier (masyarakat) memainkan peran penting di dalam proses pembudayaan Pancasila.

- 6) Lingkungan komunikasi yang efektif untuk membudayakan nilai Pancasila harus mampu memadukan fungsi-fungsi pendidikan pada tiga pilar (keluarga-sekolah-masyarakat), yang didukung oleh kebijakan, keteladanan, dan kejujuran.
- 7) Lingkungan komunikasi tidak steril dari pengaruh globalisasi dan teknologisasi yang secara dramatis mengubah gaya hidup. Generasi muda berhadapan dengan, namun tidak mampu membendung daya tarik nilai kedua elemen ini, sehingga sulit menginternalisasi nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari.

G. Pentingnya Realisasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Membentuk Identitas Kebangsaan di Kalangan Mahasiswa.

Realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai proses menjadikan nyata, perwujudan dan pelaksanaan yang nyata.

Setiap nilai yang terkandung dalam sila pancasila seharusnya teraplikasi dalam segala aspek kehidupan, agar terwujudnya kehidupan bernegara yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam merealisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, berbagai literatur menyebutkan bahwa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu strategi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dikalangan peserta didik. Pentingnya menanamkan nilai-nilai pancasila kepada generasi muda merupakan suatu usaha dan upaya untuk membentuk dan memperkuat identitas kebangsaan di hati diri pemuda Indonesia Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa era globalisasi menjadi tantangan tersendiri dalam mengawal moral peserta didik untuk tetap mencerminkan sikap-sikap yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Identitas bangsa atau juga identitas nasional merupakan ciri kepribadian yang dimiliki oleh suatu bangsa. Secara umum identitas nasional diartikan sebagai ciri/tanda/jati diri yang melekat pada suatu atau seseorang yang membedakan dengan yang lain (Kunawi Basyir dkk, 2013: 124). Adapun dijelaskan secara spesifik identitas nasional yang secara normatif adalah ciri khas suatu bangsa antara lain letak geografis, adat istiadat, nilai dan bahasa. Sementara dimensi identitas nasional yaitu tentang; (1) budi pekerti, yang menyangkut tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti

bersopan santun, berakhlak bersikap gotong royong dan lain-lain. (2) simbol-simbol, yang menyangkut tentang gambaran identitas suatu negara, seperti bahasa daerah, lagu daerah dan lain sebagainya. (3) instrument properti, yaitu sarana manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti tempat beribadah, alat transportasi dan lain-lain. (4) tujuan bersama, yaitu menyangkut tentang harapan dan cita-cita bangsa, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Kurnawi Basyir dkk, 2013: 125-126).

Dalam mewujudkan karakter anak bangsa yang memegang teguh identitas kebangsaan, dapat diimplementasikan melalui pendidikan dan perguruan tinggi dengan bentuk strategi merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, dalam kuliah umum (17/09/2020) bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa, karena kelak generasi muda yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. Sehingga, Pancasila perlu ditanamkan dalam benak setiap anak bangsa, dihadirkan dalam ruang publik, serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Irwan Gesmi, Yun Hendri. 2018. Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,

Kunawi Basyir, M. Faizin dkk. 2013. Pancasila Dan Kelarganegaraan. Surabaya: Sunan Ampel Press (PAP).

<https://www.kompasiana.com/agiesni200902/617a72d506310e32f7504bb2/realisasi-pancasila-yang-objektif>